

RENJA PERUBAHAN 2022

Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Tanjung Jabung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Kapten Pierre Tendean Tlp/Fax 0742-21575
Kuala Tungkal

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renja Perubahan ini mengacu pada Renja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, yang mana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 adalah merupakan salah satu unsur teknis Penunjang Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat maka diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk Otonomi Daerah dapat mempunyai keleluasan dan kesempatan serta kemandirian dalam menggali segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Renja Perubahannya.

Kuala Tungkal,

2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP., M.S
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001

DAFTAR ISI

| | | Halaman |
|-----------------------------|--|-----------|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar Isi | | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| BAB II | EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 | 5 |
| | 2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DINAS TENAGA KERJA Tahun 2022 | 5 |
| | 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II | 11 |
| | 2.3 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD | 16 |
| BAB III | RENJA PERUBAHANDAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA | 20 |
| | 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 20 |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Tenaga Kerja..... | 20 |
| | 3.3 Program dan Kegiatan..... | 22 |
| BAB IV | PENUTUP | 31 |

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi JPD, JMD serta Tata cara Perubahan JPD, JMD dan RKPD Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat upaya penyempurnaan Sistem Perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahap pelaksanaan musyawarah Perencanaan di Tingkat Pusat dan Daerah. Sehubungan dengan itu, Menteri Dalam Negeri telah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan secara bertahap dan fokus.

Peraturan tersebut di atas telah membawa perubahan di dalam Penyusunan Perencanaan Nasional dan Daerah. Dahulu dikenal adanya pertemuan acara Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), yang merupakan salah satu forum dalam merencanakan berbagai usulan program/kegiatan. Saat ini telah berubah menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), sebagai acuan dalam penyusunan target kinerja dari berbagai Dinas/Instansi yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusunlah Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan beedoman pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang belum terakomodir serta dengan tetap memperhatikan hasil Rapat Forum OPD yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 disusun menggunakan pendekatan Management Strategy (Strategi Manajemen) yang mengacu pada aturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Normatif yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI tahun 1956 No. 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI tahun 1965 No. 50, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 81, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3969);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab dengan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi JPD, JMD serta Tatacara Perubahan JPD, JMD dan RKPD;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;
 16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62);
 17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 22);
 18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Sstrategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Dengan kata lain juga dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) yang memuat prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan memperhatikan isu-isu strategis terhadap perkembangan dunia ketenagakerjaan agar tetap relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman arah pembangunan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu satu tahun, sesuai Visi Misi dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024. Sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DINAS TENAGA KERJA Tahun 2022
- 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA

- 3.1 Telaah Terhadap Kajian Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DINAS TENAGA KERJA Tahun 2022

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Formulir E 75. Dari Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja Dinas Tenaga Kerja periode renja dan RKA tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Formulir E. 75
Periode Renja dan RKA Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu DPA 2022 | Pagu Renja 2022 | Sumber Dana | Perubahan | | Pagu sesudah Perubahan |
|------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | | Sebelum | Sesudah | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | Rp 5.235.162.127 | Rp 9.874.089.236 | APBD II | Rp 1.994.537.692 | Rp 998.612.949 | Rp 6.231.086.870 |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | Rp 4.731.287.399 | Rp 6.294.533.236 | APBD II | Rp 1.114.955.550 | Rp 949.792.949 | Rp 4.896.450.000 |
| 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Rp73.450.000 | Rp148.720.000 | APBD II | Rp14.200.000 | Rp- | Rp87.650.000 |
| 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Tenaga Kerja | 4 laporan | 4 Laporan | Rp73.450.000 | Rp98.720.000 | APBD II | Rp14.200.000 | Rp- | Rp87.650.000 |
| 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | | | Rp3.786.324.565 | Rp3.059.773.000 | APBD II | Rp- | Rp947.992.949 | Rp2.838.331.616 |
| 2.07.01.2.01.2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 20 Orang | Rp3.655.764.565 | Rp2.934.773.000 | APBD II | Rp- | Rp947.992.949 | Rp2.707.771.616 |
| 2.07.01.2.02.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 12 Dokumen | Rp130.560.000 | Rp125.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp130.560.000 |
| 2.07.01.2.0.5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | | Rp20.400.000 | Rp272.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp20.400.000 |
| 2.07.01.2.0.5.02 | Pengadaan Pakaian | Jumlah Paket Pakaian | Dinas Tenaga | 51 stel | 51 Paket | Rp20.400.000 | Rp122.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp20.400.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 5 | Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Kerja | | | | | | | | |
| 2.07.01.2.0 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Rp462.532.834 | Rp612.281.036 | APBD II | Rp58.455.550 | Rp800.000 | Rp520.188.384 |
| 2.07.01.2.0 01 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 12 Paket | Rp4.596.176 | Rp14.742.882 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp4.596.176 |
| 2.07.01.2.0 02 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 12 Paket | Rp73.132.772 | Rp65.161.639 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp73.132.772 |
| 2.07.01.2.0 04 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 557 Paket | Rp13.590.000 | Rp27.400.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp13.590.000 |
| 2.07.01.2.0 05 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 15.129 Paket | Rp13.561.136 | Rp34.870.515 | APBD II | Rp1.800.000 | Rp- | Rp15.361.136 |
| 2.07.01.2.0 06 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 1.080 Dokumen | Rp4.320.000 | Rp8.400.000 | APBD II | Rp- | Rp800.000 | Rp3.520.000 |
| 2.07.01.2.0 09 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Tenaga Kerja | 312 paket | 312 Laporan | Rp353.332.750 | Rp453.306.000 | APBD II | Rp56.655.550 | Rp- | Rp409.988.300 |
| 2.07.01.2.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 46 Unit | Rp - | Rp 1.629.101.000 | APBD II | Rp 1.042.300.000 | Rp - | Rp 1.042.300.000 |
| 2.07.01.2.0 7 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 1 Unit | Rp - | Rp 471.615.000 | APBD II | Rp418.800.000 | Rp- | Rp418.800.000 |
| 2.07.01.2.0 7 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 8 Unit | Rp - | Rp 989.486.000 | APBD II | Rp470.500.000 | Rp- | Rp470.500.000 |
| 2.07.01.2.0 7 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 9 Unit | Rp - | Rp 168.000.000 | APBD II | Rp135.000.000 | Rp- | Rp135.000.000 |
| 2.07.01.2.0 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 15 Unit | Rp - | Rp - | APBD II | Rp18.000.000 | Rp- | Rp18.000.000 |

| Disediakan | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| 2.07.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | 224 Laporan | 224 Laporan | Rp249.800.000 | Rp252.200.000 | APBD II | Rp- | Rp1.000.000 | Rp248.800.000 |
| 2.07.01.2.0 01 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Tenaga Kerja | 200 Laporan | 200 Laporan | Rp2.000.000 | Rp5.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp2.000.000 |
| 2.07.01.2.0 02 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp91.800.000 | Rp91.200.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp91.800.000 |
| 2.07.01.2.0 04 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp156.000.000 | Rp156.000.000 | APBD II | Rp- | Rp1.000.000 | Rp155.000.000 |
| 2.07.01 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | 30 Unit | 31 Unit | Rp138.780.000 | Rp320.458.200 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp138.780.000 |
| 2.07.01 2.0 9 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Tenaga Kerja | 13 unit | 13 Unit | Rp90.465.000 | Rp133.898.200 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp90.465.000 |
| 2.07.01 2.0 9 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Tenaga Kerja | 1 unit | 1 Unit | Rp37.435.000 | Rp51.970.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp37.435.000 |
| 2.07.01 2.0 9 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dinas Tenaga Kerja | 16 unit | 16 Unit | Rp10.880.000 | Rp84.590.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp10.880.000 |
| 2.07.01 2.0 9 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 1 Unit | Rp- | Rp 50.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp- |
| 2:07:03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | Rp- | Rp 1.642.500.000 | APBD II | Rp 433.180.677 | Rp- | Rp 433.180.677 |
| 2.7.3.201 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | Rp- | Rp 1.138.500.000 | APBD II | Rp 433.180.677 | Rp- | Rp 433.180.677 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.7.3.201.1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022 | Desa Suak Labu Kec Kuala Betara, Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, Kel. Tungkal V Kec. Seberang Kota, Desa Sri Agung Kec. Batang Asam | 0 | 46 Orang | Rp - | Rp 1.138.500.000 | APBD II | Rp317.617.201 | Rp- | Rp317.617.201 |
| 2.7.3.201.3 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 13 Unit | Rp - | Rp - | APBD II | Rp115.563.476 | Rp- | Rp115.563.476 |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | Rp292.598.161 | Rp1.185.000.000 | APBD II | Rp313.356.373 | Rp12.000.000 | Rp593.954.534 |
| 2.07.04 2.0 1 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | Kab. Tanjung Jabung Barat | 350 Orang | 350 Orang | Rp120.980.000 | Rp925.000.000 | APBD II | Rp282.102.964 | Rp12.000.000 | Rp391.082.964 |
| 2.07.04 2.0 01 1 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 Orang | 0 Orang | Rp120.980.000 | Rp155.000.000 | APBD II | | Rp12.000.000 | Rp108.980.000 |
| 2.07.04 2.0 01 2 | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Kab. Tanjung Jabung Barat | 350 Orang | 350 Orang | Rp - | Rp - | APBD II | Rp40.000.000 | Rp- | Rp40.000.000 |
| 2.7.4.201.5 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | Desa Bukit Bakar, Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh, Desa Rantau Badak Kec. Muara Papalik | 0 | 60 Orang | Rp - | Rp 695.000.000 | APBD II | Rp242.102.964 | Rp- | Rp242.102.964 |
| 2.07.04 2.0 3 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal | 1000 orang | 1000 orang | Rp171.618.161 | Rp165.000.000 | APBD II | Rp31.253.409 | Rp- | Rp202.871.570 |
| 2.07.04 2.0 02 3 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal | 1000 orang | 1000 orang | Rp171.618.161 | Rp165.000.000 | APBD II | Rp 31.253.409 | Rp- | Rp202.871.570 |
| 2.07 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | Rp211.276.567 | Rp543.056.000 | APBD II | Rp133.045.092 | Rp36.820.000 | Rp307.501.659 |
| 2.07 05 2.0 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 | | Kab. Tanjung Jabung Barat | | | Rp137.526.567 | Rp238.750.000 | APBD II | Rp55.603.785 | Rp- | Rp193.130.352 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2.07 05 2.0 01 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | jumlah peraturan perusahaan yang disahkan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 15 Perusahaan | 15 Perusahaan | Rp39.858.280 | Rp40.000.000 | APBD II | Rp23.029.625 | Rp- | Rp62.887.905 |
| 2.07 05 2.0 02 1 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 15 Perusahaan | 15 Perusahaan | Rp34.658.287 | Rp35.000.000 | APBD II | Rp32.574.160 | Rp- | Rp67.232.447 |
| 2.07 05 2.0 03 1 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 10 Perusahaan/200 Orang | 10 Perusahaan/200 Orang | Rp63.010.000 | Rp163.750.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp63.010.000 |
| 2.07 05 2.0 2 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | Kab. Tanjung Jabung Barat | | | Rp73.750.000 | Rp304.306.000 | APBD II | Rp77.441.307 | Rp36.820.000 | Rp114.371.307 |
| 2.07 05 2.0 02 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 18 Perkara | | Rp73.750.000 | Rp110.800.000 | APBD II | Rp- | Rp36.820.000 | Rp36.930.000 |
| 2.07 05 2.0 02 3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 15 SP/SB | Rp- | Rp35.000.000 | APBD II | Rp45.381.307 | Rp- | Rp45.381.307 |
| 2.07 05 2.0 02 4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 1 LKS Tripartit | Rp- | Rp91.990.000 | APBD II | Rp32.060.000 | Rp- | Rp32.060.000 |

2.2 Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2022 merupakan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan triwulan II, dengan mengacu pada Pengendalian dan Evaluasi Renja Disnaker tahun 2022. Dari tabel Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2022 diatas, terlihat bahwa ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti Pelatihan. Baik itu Pelatihan Berbasis Kompetensi maupun Pelatihan Berbasis Masyarakat, dan Kegiatan dalam Program Hubungan Industrial. Untuk itu pada Perubahan APBDP Tahun 2022 ini diharapkan bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana tersebut.

Dari Kegiatan yang dilaksanakan pada APBD Tahun 2022 ini, pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan menggunakan Formulir E 81. Adapun hasil dari pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja sampai Triwulan II (Bulan Mei) Tahun 2022, Capaian rata-rata serapan keuangan sebesar 29,45%. Angka rata-rata capaian kinerja bukan berarti terkendala pada teknis kegiatan, tetapi indikator keluaran kegiatan yang tidak bisa di rinci tiap triwulan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II (Bulan April-Juni) Tahun 2022 dan capaian Renstra dijabarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

FORMULIR E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Triwulan II (April s/d Juni Tahun 2022)

| No | Sasaran | Ususi/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada tahun 2026 (akhir periode Renstra SKPD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2022 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022(%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|----|--|---|--|--|---------|--|---------------|---|--------|---------------------------------|--------|------------|--------|--|---------------|--|--------|--|--------|---|-----------|----------------------------|-----|-------------|--------|
| | | | | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | K | .(000) | | | K | .(000) |
| | | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | | | 14 = 6 + 12 | |
| 1 | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA | | | | | 4.731.287.399 | | | | | | | | 1.760.502.812 | 70 | 37,21 | | | | | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 | 73.450.000 | 20.200.000 | 3 | 39.250.000 | | | | | 3 | 39.250.000 | 75 | 53,44 | | | | | | | |
| 1 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 24 | Laporan | 542.312.500 | 4 | 56.792.500 | 4 | 73.450.000 | 2 | 20.200.000 | 3 | 39.250.000 | | | | | | | | | | Dinas ker | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 462.532.834 | | | | | | | 244.816.597 | 52 | 52,93 | | | | | | | | |
| 2 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah waktu terucupinya Penerangan Kantor | 60 | Bulan | 77.322.421 | 12 | 4.647.000 | 12 | 4.596.176 | 3 | 1.241.275 | 6 | 2.226.575 | 6 | 2.226.575 | 50 | 48 | 15 | 1.241.275 | 25,00 | 1,61 | | Dinas ker | |
| 3 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 60 | Bulan | 384.137.034 | 12 | 64.419.603 | 12 | 73.132.772 | 3 | 13.321.450 | 6 | 31.805.389 | 6 | 31.805.389 | 50 | 43 | 15 | 13.321.450 | 25,00 | 3,47 | | Dinas ker | |
| 4 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah logistik makan minum kantor | 60 | Bulan | 159.400.000 | 12 | 16.800.000 | 490 | 13.590.000 | | 2.400.000 | 176 | 5.200.000 | 176 | 5.200.000 | 36 | 38 | 15 | 2.400.000 | 25,00 | 1,51 | | Dinas ker | |
| 5 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetak dan pengadaan yang dibeli / digandakan | 60 | Bulan | 193.812.987 | 12 | 25.249.184 | 15129 | 13.561.136 | | 600.000 | 8160 | 2.635.000 | 8160 | 2.635.000 | 54 | 19 | 8172 | 600.000 | 13.620,00 | 0,31 | | Dinas ker | |
| 6 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 60 | Bulan | 40.600.000 | 12 | 3.360.000 | 1080 | 4.320.000 | | 560.000 | 18 | 1.400.000 | 18 | 1.400.000 | 2 | 32 | 30 | 560.000 | 50,00 | 1,38 | | Dinas ker | |
| 7 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang akan dilaksanakan | 60 | Bulan | 2.602.216.000 | 12 | 332.585.790 | 312 | 353.332.750 | | 85.354.793 | 374 | 201.549.633 | 374 | 201.549.633 | 120 | 57 | 386 | 85.354.793 | 643,33 | 3,28 | | Dinas ker | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 249.800.000 | | | | | | | 111.514.269 | 53 | 45 | | | | | | | | |
| 8 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikabola | 60 | Bulan | 27.025.000 | 12 | 3.000.000 | 200 | 2.000.000 | 3 | 400.000 | 960 | 1.200.000 | 120 | 1.200.000 | 60 | 60 | 132 | 400.000 | 220,00 | 1,48 | | Dinas ker | |
| 9 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah hitungan beban telepon/air/listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan | 60 | Bulan | 511.200.000 | 12 | 64.954.157 | 12 | 91.800.000 | 6 | 17.579.459 | | 33.314.269 | 6 | 33.314.269 | 50 | 36 | 18 | 17.579.459 | 30,00 | 3,44 | | Dinas ker | |
| 10 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu/bulan jasa layanan umum kantor | 60 | Bulan | 862.000.000 | 12 | 156.000.000 | | 156.000.000 | | 38.000.000 | | 77.000.000 | 6 | 77.000.000 | 50 | 49 | 18 | 38.000.000 | 30,00 | 4,41 | | Dinas ker | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|------------|----------------|------|---------------|------|---------------|----|------------|-----|---------------|-----|---------------|------------|-------|-------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah | | | | | | 138.780.000 | | | | | | | | | 51.903.400 | 88 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/perbaikan / dilapirkan pajak | 104 | unit | 759.989.500 | 13 | 104.188.731 | 13 | 90.465.000 | 4 | 9.535.600 | 12 | 29.626.250 | 12 | 29.626.250 | 92 | 33 | 15 | 9.535.600 | 14,42 | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | |
| 1 | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang teeelihara | 50 | unit | 434.280.000 | 15 | 27.035.000 | 11 | 10.880.000 | - | - | 8 | 4.640.000 | 8 | 4.640.000 | 73 | 43 | 0 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | |
| 1 | 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara/perbaikan / dibayarkan pajak dan izin | 10 | Unit | 467.730.000 | 1 | 104.188.731 | 1 | 37.435.000 | 1 | 11.088.000 | | 17.637.150 | 1 | 17.637.150 | 100 | 47 | 2 | 121.825.881 | 20,00 | 26,05 | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 3.786.324.565 | | | | | | 1.292.618.546 | | 1.292.618.546 | 50 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 60 | Bulan | 708.520.000 | 12 | 100.920.000 | 12 | 130.560.000 | 5 | 28.140.000 | 6 | 64.530.000 | 6 | 64.530.000 | 50 | 49 | 15 | 28.140.000 | 30,00 | 3,97 | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | | |
| 1 | 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 60 | Bulan | 17.208.638.609 | 12 | 2.486.864.562 | 12 | 3.655.764.565 | 5 | - | 6 | 1.228.088.546 | 6 | 1.228.088.546 | 50 | 34 | 18 | - | 30,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 20.400.000 | | | | | | 20.400.000 | | 20.400.000 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Penggadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya | umlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya | 546 | Stel | 267.600.000 | - | - | 51 | 20.400.000 | 51 | - | 51 | 20.400.000 | 51 | 20.400.000 | 100 | 100 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | | |
| | Meningkatkan pelayanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | 292.598.161 | | | | | | 101.439.500 | | 101.439.500 | 28 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Antarkeja di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 120.980.000 | | | | | | 78.117.500 | | 78.117.500 | 38 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja | Data pencari kerja berkompelensi yang dilisilasi untuk ditempatkan | 2.355 | Org | 844.114.680 | 330 | 68.513.500 | 350 | 120.980.000 | 48 | 20.475.000 | 60 | 78.117.500 | 133 | 78.117.500 | 38 | 65 | 463 | 146.631.000 | 19,66 | 17,37 | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | | |
| | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | | 171.618.161 | | | | | | 23.322.000 | | 23.322.000 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online | Tersedianya Pelayanan Informasi Administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Bagi Pencari serta Pengguna Tenaga Kerja | 5.000 | Org | 474.160.904 | 1000 | 48.135.500 | 1000 | 171.618.161 | 75 | 10.125.000 | | 23.322.000 | 180 | 23.322.000 | 18 | 14 | 1.180 | 10.125.000 | 23,60 | 2,14 | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | | |
| | Meningkatkan pembinaan hubungan industrial | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | 211.276.567 | | | | | | 29.850.000 | | 29.850.000 | 33 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | |
| | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 137.526.567 | | | | | | 23.700.000 | | 23.700.000 | 33 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Teraksananya Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Teraksananya Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten dan teraksananya penysunan naskah akademik Penda Kelenagakerjaan | 70 | Perusahaan | 523.899.555 | 20 | 11.579.500 | 200 | 63.010.000 | | 2.475.000 | 169 | 8.850.000 | 169 | 8.850.000 | 85 | 14,05 | 24 | 2.475.000 | 34,29 | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | |
| 2 | 0 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan | 75 | Perusahaan | 200.000.000 | 20 | 11.579.500 | 15 | 39.858.280 | - | 3.300.000 | 1 | 6.600.000 | 1 | 6.600.000 | 7 | 16,6 | 21 | 3.300.000 | 28,00 | 1,65 | | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | |
| 2 | 1 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan | 50 | Perusahaan | 175.000.000 | 20 | 6.825.000 | 15 | 34.658.287 | 1 | 4.125.000 | 1 | 8.250.000 | 1 | 8.250.000 | 7 | 23,8 | 21 | 4.125.000 | 42,00 | 2,36 | | | | | | | | | | | | | | | | Disna ker | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|-----|-------|-------------|----|------------|------------|---------------|---|-------------|---|---------------|-----------|--|----|------|----|-----------|-------|------|-----------|--|--|-------|-------|--|--|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselesihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 73.750.000 | | | 6.150.000 | | | 6.150.000 | 33 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Penyelesaian Perselesihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kasus yang dimediasi | 101 | Kasus | 529.179.750 | 20 | 18.800.000 | 18 | 73.750.000 | 4 | 2.475.000 | 6 | 6.150.000 | 6 | 6.150.000 | 33 | 8,34 | 26 | 2.475.000 | 25,74 | 0,47 | Disna ker | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | ST | ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | 5.235.162.127 | | 271.395.577 | | 1.891.792.312 | | 1.891.792.312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...) | | | | | | | | | | 43,66 | 36,14 | | | 22,72 | 3,27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor pendorong lainnya persentase capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2022, dipengaruhi oleh realisasi kegiatan-kegiatan rutin. Faktor penghambat : Capaian target pada Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial masih rendah sehingga persentase capaian realisasi kinerja rendah Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kinerja untuk mencapai target Renja yang telah ditentukan Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : Menjadikan Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2022 ini sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Rancangan Renstra 2021-2026, dan Visi Misi serta Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2024, pada APBD Perubahan Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan penambahan Anggaran sebesar . **2.472.185.417** (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), dan Pergeseran Anggaran dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar . 947.992.949 (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Tabel : T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nama : Dinas Tenaga Kerja

| No | Indikator | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir | OPD |
|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | Target | Realisasi | Rasio Capaian | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | | | 1 dokumen Makro | 15 dokumen Mikro | 15 dokumen Mikro | 15 dokumen Mikro | 15 dokumen Mikro | 1 dokumen makro / 60 dokumen mikro | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | Persentase tenaga kerja lulus pelatihan (bersertifikat) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Tenaga Kerja |
| 3 | Persentase tenaga kerja yang lulus pelatihan bersertifikat kompetensi | 74% | 89% | 100% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | Dinas Tenaga Kerja |
| 4 | Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui mekanisme layanan antar kerja | 342 orang | 350 orang | 100% | 350 orang | 400 orang | 410 orang | 420 orang | 430 orang | 430 orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 5 | Persentase perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja | 72% | 91% | 100% | 78% | 84% | 90% | 96% | 100% | 100% | Dinas Tenaga Kerja |
| 6 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; | 20 Kasus | 25 kasus | 100% | 20 Kasus | 18Kasus | 16Kasus | 14Kasus | 13Kasus | 101 Kasus | Dinas Tenaga Kerja |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 7 | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB); | 10 Kasus | 6 kasus | 60% | 10Kasus | 9 Kasus | 8Kasus | 7 Kasus | 7Kasus | 51 Kasus | Dinas Tenaga Kerja |
| 8 | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (BPJS); | 200 orang | 200 orang | 100% | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 6.136 orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 9 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; | 0% | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dinas Tenaga Kerja |
| 10 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi; | 10 Orang | 128 Orang | 100% | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 410 Orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 11 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat; | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dinas Tenaga Kerja |
| 12 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan; | - | 121 Orang | 100% | 40 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 200 Orang | Dinas Tenaga Kerja |
| 13 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | 17 Sub Kegiatan | - | - | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 17 Sub Kegiatan | 100% | Dinas Tenaga Kerja |
| 14 | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 10 Orang | 71 orang | 100% | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 410 Orang | Dinas Tenaga Kerja |
| | Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | 60 orang | 71 orang | 100% | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 15 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). | 20 Perusahaan | 20 Perusahaan | 100% | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 10 Perusahaan | 70 Perusahaan | Dinas Tenaga Kerja |
| 16 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten | 345 orang | 350 orang | 100% | 350 orang | 400 orang | 410 orang | 420 orang | 430 orang | 2.355 Orang | Dinas Tenaga Kerja |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada kebijakan Nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah, dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Faktor – faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai – nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadikan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan melihat Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Tenaga Kerja melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

VISI

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)”**

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Kabupaten Tanjung jabung Barat menetapkan misi-misi apa saja yang harus dilaksanakan. Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada Misi III dan Misi IV, yaitu :

MISI III

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

MISI IV

Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat dalam upaya mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, membuat skema dalam pencapaiannya seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) | | | |
|---|--|--|--|
| MISI III : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik | | | |
| MISI IV : Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Terselenggara Tata Kelola Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel | 1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 1. Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja | 1. Penyusunan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2. Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan | 1. Meningkatnya pelayanan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja 2. Meningkatnya pembinaan hubungan industrial | 1. Meningkatkan Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja 2. Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 1. Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro 2. Memberikan pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja dan potensi lokal serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelatihan 3. Penempatan Tenaga Kerja yang Berkualitas 4. Memberikan pelatihan berbasis kewirausahaan sesuai potensi lokal dan produk unggulan daerah 5. Memberikan perlindungan tenaga kerja untuk hubungan industrial yang harmonis |

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana program, kegiatan Indikator Kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju Visi dan Misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

3. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
Perluasan Kesempatan Kerja
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
4. Program Hubungan Industrial
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota"
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menunjang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Lokasi | Target Capaian Kinerja | | Pagu DPA 2022 | Pagu Renja 2022 | Sumber Dana | Perubahan | | Pagu sesudah Perubahan |
|--------------------|---|--|--------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | | | Sebelum | Sesudah | | | | Bertambah | Berkurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | Rp 5.235.162.127 | Rp 9.874.089.236 | APBD II | Rp 1.994.537.692 | Rp 998.612.949 | Rp 6.231.086.870 |
| 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | Rp 4.731.287.399 | Rp 6.294.533.236 | APBD II | Rp 1.114.955.550 | Rp 949.792.949 | Rp 4.896.450.000 |
| 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Rp73.450.000 | Rp148.720.000 | APBD II | Rp14.200.000 | Rp- | Rp87.650.000 |
| 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Tenaga Kerja | 4 laporan | 4 Laporan | Rp73.450.000 | Rp98.720.000 | APBD II | Rp14.200.000 | Rp- | Rp87.650.000 |
| 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | | | Rp3.786.324.565 | Rp3.059.773.000 | APBD II | Rp- | Rp947.992.949 | Rp2.838.331.616 |
| 2.07.01.2.0 01 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 20 Orang | Rp3.655.764.565 | Rp2.934.773.000 | APBD II | Rp- | Rp947.992.949 | Rp2.707.771.616 |
| 2.07.01.2.0 02 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 12 Dokumen | Rp130.560.000 | Rp125.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp130.560.000 |
| 2.07.01.2.0 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 12 Bulan | | Rp20.400.000 | Rp272.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp20.400.000 |
| 2.07.01.2.0 5 02 5 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Tenaga Kerja | 51 stel | 51 Paket | Rp20.400.000 | Rp122.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp20.400.000 |
| 2.07.01.2.0 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Rp462.532.834 | Rp612.281.036 | APBD II | Rp58.455.550 | Rp800.000 | Rp520.188.384 |
| 2.07.01.2.0 01 6 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 12 Paket | Rp4.596.176 | Rp14.742.882 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp4.596.176 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|
| | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 2.07.01.2.0 02 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 12 Paket | Rp73.132.772 | Rp65.161.639 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp73.132.772 |
| 2.07.01.2.0 04 6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 557 Paket | Rp13.590.000 | Rp27.400.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp13.590.000 |
| 2.07.01.2.0 05 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 15.129 Paket | Rp13.561.136 | Rp34.870.515 | APBD II | Rp1.800.000 | Rp- | Rp15.361.136 |
| 2.07.01.2.0 06 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Bulan | 1.080 Dokumen | Rp4.320.000 | Rp8.400.000 | APBD II | Rp- | Rp800.000 | Rp3.520.000 |
| 2.07.01.2.0 09 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Tenaga Kerja | 312 paket | 312 Laporan | Rp353.332.750 | Rp453.306.000 | APBD II | Rp56.655.550 | Rp- | Rp409.988.300 |
| 2.07.01.2.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 46 Unit | Rp - | Rp 1.629.101.000 | APBD II | Rp 1.042.300.000 | Rp - | Rp 1.042.300.000 |
| 2.07.01.2.0 7 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 1 Unit | Rp - | Rp 471.615.000 | APBD II | Rp418.800.000 | Rp- | Rp418.800.000 |
| 2.07.01.2.0 7 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 8 Unit | Rp - | Rp 989.486.000 | APBD II | Rp470.500.000 | Rp- | Rp470.500.000 |
| 2.07.01.2.0 7 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 9 Unit | Rp - | Rp 168.000.000 | APBD II | Rp135.000.000 | Rp- | Rp135.000.000 |
| 2.07.01.2.0 7 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 0 Unit | 15 Unit | Rp - | Rp - | APBD II | Rp18.000.000 | Rp- | Rp18.000.000 |
| 2.07.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | 224 Laporan | 224 Laporan | Rp249.800.000 | Rp252.200.000 | APBD II | Rp- | Rp1.000.000 | Rp248.800.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 2.07.01.2.0 01 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Tenaga Kerja | 200 Laporan | 200 Laporan | Rp2.000.000 | Rp5.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp2.000.000 |
| 2.07.01.2.0 02 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp91.800.000 | Rp91.200.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp91.800.000 |
| 2.07.01.2.0 04 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Tenaga Kerja | 12 Laporan | 12 Laporan | Rp156.000.000 | Rp156.000.000 | APBD II | Rp- | Rp1.000.000 | Rp155.000.000 |
| 2.07.01 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Dinas Tenaga Kerja | 30 Unit | 31 Unit | Rp138.780.000 | Rp320.458.200 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp138.780.000 |
| 2.07.01 2.0 9 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Tenaga Kerja | 13 unit | 13 Unit | Rp90.465.000 | Rp133.898.200 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp90.465.000 |
| 2.07.01 2.0 9 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Tenaga Kerja | 1 unit | 1 Unit | Rp37.435.000 | Rp51.970.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp37.435.000 |
| 2.07.01 2.0 9 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dinas Tenaga Kerja | 16 unit | 16 Unit | Rp10.880.000 | Rp84.590.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp10.880.000 |
| 2.07.01 2.0 9 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Tenaga Kerja | 0 | 1 Unit | Rp- | Rp 50.000.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp- |
| 2:07:03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | Rp - | Rp 1.642.500.000 | APBD II | Rp 433.180.677 | Rp- | Rp 433.180.677 |
| 2.7.3.201 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | | | | | Rp - | Rp 1.138.500.000 | APBD II | Rp 433.180.677 | Rp - | Rp 433.180.677 |
| 2.7.3.201.1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022 | Desa Suak Labu Kec Kuala Betara, Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu, Kel. Tungkal V Kec. Seberang Kota, | 0 | 46 Orang | Rp - | Rp 1.138.500.000 | APBD II | Rp317.617.201 | Rp- | Rp317.617.201 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Desa Sri Agung Kec. Batang Asam | | | | | | | | |
| 2.7.3.201.3 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 13 Unit | Rp - | Rp - | APBD II | Rp115.563.476 | Rp- | Rp115.563.476 |
| 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | Rp292.598.161 | Rp1.185.000.000 | APBD II | Rp313.356.373 | Rp12.000.000 | Rp593.954.534 |
| 2.07.04 2.0 1 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | | Kab. Tanjung Jabung Barat | 350 Orang | 350 Orang | Rp120.980.000 | Rp925.000.000 | APBD II | Rp282.102.964 | Rp12.000.000 | Rp391.082.964 |
| 2.07.04 2.0 01 1 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 Orang | 0 Orang | Rp120.980.000 | Rp155.000.000 | APBD II | | Rp12.000.000 | Rp108.980.000 |
| 2.07.04 2.0 01 2 | Pelayanan antar Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Kab. Tanjung Jabung Barat | 350 Orang | 350 Orang | Rp - | Rp - | APBD II | Rp40.000.000 | Rp- | Rp40.000.000 |
| 2.7.4.201.5 | Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | Desa Bukit Bakar, Desa Tanah Tumbuh Kec. Renah Mendaluh, Desa Rantau Badak Kec. Muara Papalik | 0 | 60 Orang | Rp - | Rp 695.000.000 | APBD II | Rp242.102.964 | Rp- | Rp242.102.964 |
| 2.07.04 2.0 3 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal | 1000 orang | 1000 orang | Rp171.618.161 | Rp165.000.000 | APBD II | Rp31.253.409 | Rp- | Rp202.871.570 |
| 2.07.04 2.0 02 3 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | Kab. Tanjung Jabung Barat Tungkal | 1000 orang | 1000 orang | Rp171.618.161 | Rp165.000.000 | APBD II | Rp 31.253.409 | Rp- | Rp202.871.570 |
| 2.07 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | Rp211.276.567 | Rp543.056.000 | APBD II | Rp133.045.092 | Rp36.820.000 | Rp307.501.659 |
| 2.07 05 2.0 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Kab. Tanjung Jabung Barat | | | Rp137.526.567 | Rp238.750.000 | APBD II | Rp55.603.785 | Rp- | Rp193.130.352 |
| 2.07 05 2.0 01 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | jumlah peraturan perusahaan yang disahkan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 15 Perusahaan | 15 Perusahaan | Rp39.858.280 | Rp40.000.000 | APBD II | Rp23.029.625 | Rp- | Rp62.887.905 |
| 2.07 05 2.0 02 1 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi | Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi | Kab. Tanjung Jabung Barat | 15 Perusahaan | 15 Perusahaan | Rp34.658.287 | Rp35.000.000 | APBD II | Rp32.574.160 | Rp- | Rp67.232.447 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.07 05 2.0 03 1 | Perusahaan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | perusahaan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 10 Perusahaan/200 Orang | 10 Perusahaan/200 Orang | Rp63.010.000 | Rp163.750.000 | APBD II | Rp- | Rp- | Rp63.010.000 |
| 2.07 05 2.0 2 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | | Kab. Tanjung Jabung Barat | | | Rp73.750.000 | Rp304.306.000 | APBD II | Rp77.441.307 | Rp36.820.000 | Rp114.371.307 |
| 2.07 05 2.0 02 2 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | Kab. Tanjung Jabung Barat | 18 Perkara | | Rp73.750.000 | Rp110.800.000 | APBD II | Rp- | Rp36.820.000 | Rp36.930.000 |
| 2.07 05 2.0 02 3 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 15 SP/SB | Rp - | Rp 35.000.000 | APBD II | Rp45.381.307 | Rp- | Rp45.381.307 |
| 2.07 05 2.0 02 4 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Kab. Tanjung Jabung Barat | 0 | 1 LKS Tripartit | Rp- | Rp91.990.000 | APBD II | Rp32.060.000 | Rp | Rp32.060.000 |

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan isu strategis lingkup Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan agar terwujudnya aparatur yang professional, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Serta aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agenda reformasi birokrasi pada periode pembangunan lalu yang belum dituntaskan.

Meskipun disadari bahwa dalam upaya pengurangan pengangguran dan pembinaan ketenagakerjaan bukan hal yang mudah, Para Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam mengemban amanat pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan. Diharapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai institusi pemerintah, mampu terus berbenah diri dalam berbagai perubahan lingkungan untuk mencapai tujuannya, yaitu Terselenggara Tata Kelola Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dan Meningkatkan Produktivitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Kuala Tungkal, 2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780626 199612 1 001